

V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

1. Hasil dari analisis Rappfish nilai indeks keberlanjutan dimensi ekologi ditunjukkan oleh nilai indeks keberlanjutan indikator status eksploitasi 24%, tekanan pemanfaatan perairan 28%, *trophic level* 28%, perubahan ukuran ikan 29% dan daerah penangkapan 29%. Hal ini dapat diartikan indeks keberlanjutan dimensi ekologi mempunyai nilai 29% yaitu "buruk"
2. Indeks Keberlanjutan dimensi ekonomi ditunjukkan oleh nilai indeks keberlanjutan indikator kontribusi perikanan daerah 89%, curahan waktu 50%, subsidi 74%, alternatif pekerjaan 36%, orientasi pasar 26%, harga 67%, sektor tenaga kerja 52%, dan persentase pendapatan 31%. Hal ini dapat diartikan indeks keberlanjutan dimensi ekonomi mempunyai nilai 53% yaitu "cukup".
3. Indeks Keberlanjutan dimensi sosial ditunjukkan oleh nilai indeks keberlanjutan indikator kemandirian usaha 89%, perkembangan KUB 26%, pengetahuan lingkungan 74%, frekuensi konflik 31% dan pengaruh nelayan 63%. Hal ini dapat diartikan indeks keberlanjutan dimensi sosial mempunyai nilai 57% yaitu "cukup".
4. Indeks Keberlanjutan dimensi etika ditunjukkan oleh nilai indeks keberlanjutan indikator dasar masuk perikanan 79%, *co-management* 78%, ijin usaha 70% dan ikan dibuang 98%. Hal ini dapat diartikan indeks keberlanjutan dimensi etika mempunyai nilai 81% yaitu "baik sekali".

5. Indeks Keberlanjutan dimensi teknologi ditunjukkan oleh nilai indeks keberlanjutan indikator sifat pengoperasian alat tangkap 47%, selektivitas alat tangkap 44%, alat bantu 47%, ukuran kapal 58%, dampak samping alat tangkap 91% dan lama trip 31%. Hal ini dapat diartikan indeks keberlanjutan dimensi teknologi mempunyai nilai 53% yaitu "cukup".
6. Dari kelima dimensi yang menentukan keberlanjutan ikan lemuru di Selat Bali, dimensi etika mempunyai nilai indeks keberlanjutan paling tinggi yaitu 81% yang artinya "baik sekali" dan dimensi yang mempunyai nilai keberlanjutan paling rendah ialah dimensi ekologi dengan nilai keberlanjutan 29% yang artinya "buruk". Tetapi jika nelayan menerapkan kode etik dalam menangkap ikan, seharusnya tidak terjadi kerusakan ekologi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran nelayan/etika muncul setelah terjadi kerusakan ekologi.

5.2 Saran-Saran

1. Mengingat melakukan pengelolaan perikanan lemuru di Selat Balu tidak hanya mengatur tentang ikannya saja melainkan tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya, maka manajemen body yang dibentuk di Selat Bali perlu mengingatkan kembali tentang peran masing-masing instansi terkait lainnya.
2. Perbaikan pengelolaan perikanan lemuru secara bersama instansi terkait juga dilakukan perbaikan pengaturan terhadap aspek teknis perikanan (ukuran kapal dan alat tangkap), aspek perdagangan (jumlah dan kapasitas unit pengelolaan) dan aspek sosial masyarakatan guna menangani penyakit

sosial masyarakat serta peningkatan infrastruktur bagi kemudahan pelaku perikanan.

3. Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap SKB Gubernur Jawa Timur dan Bali nomor 238 tahun 1992// SKB 673 tahun 1992.
4. Perlu dibangun sistem pengelolaan konflik yang terjadi dalam masyarakat nelayan di Muncar antara lain: *illegal fishing*, nelayan andon, konversi hutan mangrove, jumlah nelayan bagan, dan ukuran mata jaring. Peran pemerintah lebih dominan terutama dalam regulasi dan penyediaan fasilitas sedangkan *stakeholders* yang lain sebagai pelaku utama di lapangan terutama nelayan dan pengusaha.
5. Perlu adanya duduk bersama semua sektor baik nelayan maupun pemerintah untuk pengelolaan perikanan lemuru yang berkerlanjutan.

